

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

###### **2.1.1.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek hidup, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasi apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. (Anggraini, 2018)

Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang Nobel India Amartya Sen dan seorang ekonomi Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Universitas Yale dan Lord Meghnad Desai dari *London School of Economics*. Sejak itu indeks ini dipakai oleh program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya. Amartya Sen menggambarkan indeks ini sebagai “pengukuran vulgar” oleh karena batasannya. Indeks ini lebih berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna dari pada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.

Menurut *Nation Development Program* (UNDP) 2001 Indeks Pembangunan Manusia adalah “proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk” dalam arti bahwa manusia diberi pilihan yang lebih banyak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang menyangkut ekonomi, sosial, dan budaya. (Firmansyah, 2015)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 Indeks Pembangunan Manusia adalah bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pembangunan manusia pada skala 0 - 100 dengan kategori sebagai berikut:

1. Sangat Tinggi :  $\geq 80$
2. Tinggi :  $70 \leq \text{IPM} < 80$
3. Sedang :  $60 \leq \text{IPM} < 70$
4. Rendah :  $< 60$

#### **2.1.1.2 Komponen-komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tiga komponen yang digunakan sebagai dasar perhitungannya: (1) Umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran, (2) Pengetahuan yang dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah, dan (3) Standar hidup layak yang dihitung dari Produk Domestik Bruto/PDB (keseimbangan kemampuan berbelanja) per kapita.

1. Angka harapan hidup (*longevity*).

Menunjukkan jumlah tahun hidup dapat dinikmati penduduk suatu wilayah dengan memasukkan informasi angka kelahiran dan kematian per tahun.

Dan umur panjang dan sehat diukur menggunakan indikator harapan hidup pada saat lahir.

Seseorang dapat bertahan hidup lebih lama apabila dia sehat dan jika menderita sakit dia harus mengatur untuk membantu mempercepat kesembuhannya sehingga dia dapat bertahan hidup lebih lama (datang ke fasilitas/petugas kesehatan). (Alfiya, 2018)

## 2. Pengetahuan

Ada dua indikator pendidikan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Tingkat pendidikan juga diakui secara luas sebagai unsur mendasar pembangunan manusia. Prestasi pembangunan masyarakat diukur dengan melihat seberapa jauh masyarakat di kawasan tersebut telah memanfaatkan sumber dayanya untuk memberikan fasilitas kepada warganya agar menjadi lebih cerdas.

Hidup sehat dan cerdas diyakini meningkatkan kemampuan produktivitas seseorang, sedangkan hidup yang panjang dalam keadaan tetap sehat dan cerdas juga memperpanjang masa produktif tersebut sehingga akan meningkatkan mutu peran warga tersebut sebagai pelaku (*agent*) pembangunan.

## 3. Standar hidup layak

Dalam cakupan lebih luas standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto riil yang disesuaikan, sedangkan BPS

menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi yang terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Yang dominan dikonsumsi masyarakat dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan waktu menurut Indeks PPP.

### 2.1.1.3 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/Negara.
3. Bagi Indonesia, IPM merupakan data startegis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

### 2.1.1.4 Perbedaan Metode Lama dan Baru

**Tabel 2.1 Perbandingan Metode perhitungan Lama dan Baru**

	Indikator	Lama	Baru
a	Kesehatan	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
b	Pendidikan	1. Angka Melek Huruf (AHM) 2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	1. <i>Harapan Lama Sekolah (HLS)</i> 2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
c	Standar Hidup	PDRB per kapita (27 komoditas PPP)	PNB per kapita (96 komoditas PPP)
	Agregasi Indeks	Rata-rata hitung $IPM = \frac{1}{3}(I_{Kes} + I_{Pend} + I_{Pendapatan}) \times 100$	Rata-rata ukur/ <i>Geometrik</i> $IPM = \sqrt[3]{I_{Kes} \times I_{Pend} \times I_{Pendapatan}} \times 100$

*Sumber: Badan Pusat Statistik*

Menurut BPS (2014) Pada tahun 1990, UNDP merilis IPM dalam *Human Development Report* (HDR). Indeks ini kemudian diadopsi oleh banyak negara

untuk mengukur kualitas manusia sebagai dampak dari proses pembangunan. Setelah berjalan dua dekade, tercatat UNDP melakukan dua kali menyempurnakan pada tahun 1991 dan 1995 dan perubahan (metode baru) pada tahun 2010. Adapun perbedaan kedua metode perhitungan tersebut adalah: (Fajrin, 2016)

Berdasarkan tabel 2.1 bahwa usia hidup diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH) yang dihitung menggunakan metode tidak langsung (metode *Brass*, Varian Trussel) berdasarkan variable rata-rata anak yang masih hidup.

Komponen pendidikan metode lama diukur dengan Angka Melek Huruf (AHM) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sebagai catatan UNDP dalam publikasi tahun HDR sejak 1995 menggunakan indikator partisipasi sekolah dasar, menengah, tinggi, sebagai pengganti rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variable secara simultan, yaitu tingkat/kelas yang sedang pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan kemudian pada tahun 2010 UNDP menyempurnakan perhitungan IPM dengan mengubah komponen pendidikan menjadi Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Sebagai catatan UNDP menggunakan PDB perkapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) sebagai ukuran komponen tersebut karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara. Kemudian pada tahun 2010 berubah menjadi PNB perkapita.

Selain indikator baru, UNDP melakukan perubahan cara perhitungan indeks. Untuk menghitung agregasi indeks, digunakan rata-rata geometrik (*geometrik mean*). Cara menghitung indeks terbilang baru ini cenderung sensitif terhadap ketimpangan yang terjadi antar dimensi, rata-rata *geometrik* menuntut keseimbangan ketiga dimensi IPM agar capaian IPM menjadi optimal.

#### 2.1.1.5 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Dalam indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga komponen indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara, yaitu:

1. Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi).
2. Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga).
3. Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.

$$IPM = \frac{1}{3} (\text{Indeks } x_1 + \text{Indeks } x_2 + \text{Indeks } x_3)$$

Keterangan:

X<sub>1</sub>: Indeks harapan hidup

X<sub>2</sub>: Indeks pendidikan  $\frac{2}{3}$  (indeks melek huruf +  $\frac{1}{3}$  (indeks rata-rata lama sekolah)

X<sub>3</sub>: Indeks standar hidup layak

### **2.1.1.6 Pengukuran Pertumbuhan Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia**

Mengukur kecepatan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan pertahun. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan perbandingan antara perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Maka semakin cepat juga Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat digunakan sebagai kinerja Pembangunan Manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Adapun rumusnya sebagai berikut: (Nurhikmat, 2021)

$$Pertumbuhan\ IPM = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

IPM<sub>t</sub> : Indeks pembangunan manusia suatu wilayah pada tahun t

IPM<sub>(t-1)</sub>: Indeks pembangunan manusia suatu wilayah pada tahun (t-1)

## **2.1.2 Tingkat Kemiskinan**

### **2.1.2.1 Pengertian Kemiskinan**

Kemiskinan adalah salah satu kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi standar hidup secara ekonomi masyarakat disuatu daerah. Fenomena ini biasa terjadi karena rendahnya pendapatan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Rendahnya penghasilan akan menyebabkan kurangnya

kemampuan untuk memenuhi standar hidup seperti standar kesehatan dan pendidikan. Masalah kemiskinan sangat sering terjadi di beberapa negara yang sedang berkembang dengan tingkat penduduk yang tinggi sehingga terjadi ketidakmeratanya kesejahteraan masyarakat yang dapat menyebabkan ketimpangan sosial antar masyarakat.

Menurut Sudibyo (2009) kemiskinan adalah kondisi deprivasi terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa sandang, pangan, papan dan pendidikan dasar. Kemiskinan juga sering disandingkan dengan kesenjangan, karena masalah kesenjangan mempunyai kaitan erat dengan kemiskinan. Kesenjangan adalah ketidakmerataan akses terhadap sumber ekonomi.

Istilah kemiskinan selalu melekat dan begitu populer dalam masyarakat. Untuk memberi pemahaman konseptual, ada dua pengertian kemiskinan:

1. Secara kualitatif, kemiskinan adalah suatu kondisi yang didalamnya hidup manusia tidak layak sebagai manusia.
2. Secara kuantitatif, kemiskinan adalah suatu keadaan dimana hidup manusia serba kekurangan, atau dengan bahasa tidak lazim “tidak berharta benda” (Mardimin, 2013).

*International Labor Organization (ILO)* 1976, menggunakan ukuran kebutuhan pokok untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Indikator kebutuhan pokok adalah pangan, papan, sandang, dan fasilitas umum seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan transportasi.

Bappenas (2012) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, SDA dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan dan ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Menurut BPS, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan maupun non pangan. BPS menghitung angka kemiskinan lewat tingkat konsumsi penduduk atas kebutuhan dasar (*basic need*).

#### **2.1.2.2 Faktor Penyebab Kemiskinan**

Menurut (*World Bank*) ada 3 faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu:

1. Rendahnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti : makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan dan pendidikan
2. Ketidakmampuan untuk bersuara dan ketiadaan kekuatan didepan institusi negara dan masyarakat.

3. Rentan terhadap guncangan ekonomi, terkait dengan ketidakmampuan menanggulangnya.

Menurut Todaro (2011: 26-27) kemiskinan timbul karena ada sebagian daerah yang belum sepenuhnya tertangani, ada sebagian sektor yang harus menampung tenaga kerja secara berlebih dengan tingkat produktivitas yang rendah, dan ada pula sebagian masyarakat yang belum ikut serta dalam proses pembangunan sehingga belum dapat menikmati hasilnya secara memadai. (Sylvia Yasmin Supraba, 2018)

Menurut Houghton dan Kandker (2009) ada empat karakteristik penyebab kemiskinan:

1. Karakteristik Regional yaitu: Terisolasi terpencil termasuk di dalamnya buruknya infrastruktur dan tertinggal sehingga tidak mampu mengakses pasar dan pelayanan publik, sumber daya alam termasuk didalamnya kemampuan lahan dan kualitas tanah, cuaca termasuk (iklim, kondisi lingkungan, dan lainnya), tata kelola wilayah dan ketidak merataan manajemen.
2. Karakteristik komunitas yaitu: Infrastruktur (air bersih, jalan, listrik dan lainnya), distribusi lahan, akses terhadap barang dan jasa (pendidikan, kesehatan, dan lainnya), struktur sosial dan modal sosial.
3. Karakteristik Rumah Tangga yaitu: Ukuran rumah, rasio ketergantungan (anggota keluarga yang menganggur termasuk yang belum kerja), Jenis kelamin kepala keluarga termasuk yang berusia dini,

asal (tanah, peralatan, alat produksi, rumah dan perhiasan dan lainnya), pekerjaan dan *income*, kesehatan dan pendidikan anggota keluarga.

4. Karakteristik Individu yaitu: Usia, pendidikan, status perkawinan, suku/daerah.

### **2.1.2.3 Jenis-jenis Kemiskinan**

Menurut Cambers dalam Nasikun (2001), kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

1. Kemiskinan absolut atau mutlak, yaitu mendeskripsikan individu-individu yang tingkat pendapatannya dibawah garis kemiskinan yang ditetapkan negara. Atau dapat diartikan kondisi ekonomi individu yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya.
2. Kemiskinan relative, yaitu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan kultural, yaitu sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemborosan, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
4. Kemiskinan struktural, yaitu situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem

sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan. (Khomsan & Dkk, 2015)

#### **2.1.2.4 Ciri-ciri kemiskinan**

Tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik, rendahnya pendidikan dan keterampilan yang berguna untuk kehidupannya, pendapatan masih rendah atau tidak berpendapat, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, tidak memiliki tempat tinggal, rendahnya sumber daya manusia, rentan terhadap guncangan baik individu maupun massa, ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan, ketiadaan akses terhadap kebutuhan dasar lain (seperti kesehatan dan lain-lain), tidak ada jaminan masa depan dan tidak terlibat dalam kegiatan dalam masyarakat.

#### **2.1.2.5 Karakteristik Kemiskinan**

##### **1. Karakteristik kondisi geografis**

Tingkat kemiskinan tertinggi umumnya berada di wilayah perdesaan. Penduduk miskin di daerah perdesaan cenderung memiliki pendapatan dan daya konsumsi yang rendah, menderita kekurangan gizi, buta huruf, tinggi resiko terhadap kematian bayi, dan standar perumahan yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan.

## 2. karakteristik demografis.

Rumah tangga miskin cenderung memiliki ukuran keluarga yang besar dengan jumlah anak yang lebih banyak. Namun, dengan pendapatan anggota keluarga yang terbatas dan jumlah tanggungan yang tinggi menyebabkan mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi seluruh anggota keluarga. Selain itu, pada rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan, kecenderungan untuk berada pada kondisi kemiskinan menjadi lebih besar bila dibandingkan dengan rumah tangga pada umumnya (Killick, 1981).

## 3. karakteristik aset.

Pendapatan seseorang memiliki keterkaitan dengan aset yang dimiliki, seperti lahan dan juga kualitas sumber daya manusianya. Dalam perekonomian yang mayoritas penduduknya bekerja sektor pertanian seperti Indonesia, lahan merupakan salah satu aset penting yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi. Namun, rumah tangga miskin umumnya tidak memiliki lahan dan/atau tidak memiliki sumber daya manusia yang mampu mengelola lahan tersebut (Adelman, 1986).

### **2.1.2.6 Ukuran kemiskinan**

1. Bank Dunia membuat indeks kemiskinan yang berlaku untuk negara berkembang. Ambang kemiskinan adalah tingkat pemenuhan kebutuhan fisik sebanyak 2.100 kalori sehari dinyatakan dalam uang. Jika di

kalkulasi mata uang. Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan internasional sebesar *US\$* 1,25 per kapita per hari. Artinya, penduduk yang dianggap miskin di dunia memiliki pengeluaran kurang dari *US\$* 1,25 per hari. (Rustanto, 2015)

2. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan tolak ukur Bank Dunia yaitu rata-rata pengeluaran per kapita penduduk dalam memenuhi 2.100 kalori per hari, ditambah kebutuhan minimum lain meliputi perumahan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan

#### **2.1.2.7 Strategi Penanggulangan kemiskinan**

Program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan (2008) yaitu:

1. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. (Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton, dan stabilitas/kepastian harga komoditas primer).
2. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin. (Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/ syariah dan konvensional).
3. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di desa dan kota. Program pembangunan daerah tertinggal dan khusus).
4. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. (Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin untuk sekolah 12 tahun, beasiswa mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi).

5. Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin (pemberdayaan social keluarga, fakir miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan social lainnya). (Josep, 2018)

### **2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Lincolin Arsyad (1999) Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Dalam penggunaan yang lebih umum, istilah pertumbuhan ekonomi biasanya digunakan untuk menyatakan perkembangan ekonomi di negara-negara maju, sedangkan pembangunan ekonomi untuk menyatakan perkembangan di negara sedang berkembang. (Dinna, 2018)

Definisi pertumbuhan ekonomi yang lainnya adalah bertambahnya pendapatan nasional dalam periode tertentu misalnya dalam satu tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dari kapasitas produksi maupun jasa dalam kurun waktu tertentu. Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Perlu diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan ekonomi, kedua istilah ini mempunyai arti yang sedikit berbeda. Kedua-duanya memang menerangkan mengenai perkembangan. (Ibrahim hasyim, 2016)

Perbedaan dan persamaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

Perbedaan:

- Pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, tidak hanya penambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur perekonomian.
- Pertumbuhan ekonomi lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat *output* produksi yang dihasilkan.

Persamaan:

- Lebih cenderung pada persoalan dibidang ekonomi.
- Fokus permasalahan terletak pada jumlah pendapatan per kapita.
- Merupakan tanggung jawab pemerintah yang didukung rakyat.
- Memberikan dampak kepada kesejahteraan rakyat.

### **2.1.3.2 Faktor-faktor Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut (Jhingan, 2012) pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor non ekonomi, yaitu:

#### 1. Faktor Ekonomi

Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai ketentuan utama yang mempengaruhi pertumbuhan. Laju pertumbuhan ekonomi jatuh atau banggunya merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi dalam faktor produksi tersebut. Beberapa faktor ekonomi tersebut adalah:

- a) Sumber Daya Alam
- b) Akumulasi Modal

- c) Organisasi
- d) Kemajuan Teknologi
- e) Pembagian Kerja dan Skala Produksi

## 2. Faktor Non Ekonomi

Faktor non ekonomi memiliki arti penting dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut Nurkse, pembangunan ekonomi berkaitan dengan peranan manusia, pandangan masyarakat, kondisi politik, dan latar belakang historis. Berikut adalah Pokok perubahan faktor non ekonomi:

- a) Faktor Sosial dan Budaya
- b) Faktor Manusia
- c) Faktor Politik dan Administratif

### **2.1.3.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi**

#### 1. Adam Smith

Teori pertumbuhan menurut Adam Smith berkaitan dengan dua unsur, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. pertumbuhan output dipengaruhi oleh tiga unsur pokok, yaitu sumber-sumber alam, sumber-sumber tenaga kerja (jumlah penduduk), jumlah modal.

Sumber-sumber alam jumlahnya terbatas, sehingga pertumbuhan ekonomi tergantung dengan batas maksimal sumber alam itu. Agar pertumbuhan output tercapai, sumber alam ini harus dimanfaatkan oleh tenaga kerja dan modal, sedangkan penduduk adalah unsur yang pasif dalam proses pertumbuhan. Penduduk akan bertambah jika kebutuhan tenaga kerja bertambah dan tingkat upah yang diterima cukup

memenuhi kebutuhan (tingkat upah subsistensi). Jadi, modal berperan terbesar dalam pertumbuhan ekonomi.

2. David Richardo

David Richardo keterbatasan jumlah tanah merupakan faktor terjadinya penurunan produk margin. Dengan kata lain apabila terjadi pertumbuhan penduduk (kenaikan tenaga kerja) akan mengakibatkan produksi menjadi menurun. Namun apabila terjadi kemajuan teknologi dan akumulasi modal yang cukup, dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan.

3. Robert M. Solow

pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan dan penawaran penyediaan faktor-faktor produksi penduduk, tenaga kerja, dan tingkat kemajuan teknologi. (Dr. H. Imam Hardjanto, MBA., MAP., 2011)

4. Harrod dan Domar

Teori Harrod-Domar dengan melengkapi analisis Keynes. Menurut Keynes campur tangan pemerintah secara tidak langsung dalam sistem perekonomian masyarakat sangat diperlukan. Lebih memfokuskan analisis ekonomi jangka pendek, dimana pada saat itu dunia sedang mengalami depresi dan pengangguran. Dalam perkembangannya menekan pada dua inti penting yaitu:

a) Akumulasi modal (*physical capital formation*)

b) Peningkatan kualitas dan investasi sumber daya manusia (*human capital*)

Harro dan Domar menekankan pentingnya aspek permintaan dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi akan ditentukan dua unsur:

- a) Tingkat tabungan (investasi)
- b) Produktivitas kapital (*capital output ratio*)

5. Pertumbuhan Endogen dicetus oleh Paul M Romer (1986) dan Robert Lucas (1988).

pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari sistem ekonomi itu sendiri yang didorong dari sistem produksi. Kemajuan bidang teknologi merupakan hal yang endogen, pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan dalam pendapatan apabila modal yang tumbuh bukan hanya modal fisik tetapi juga menyangkut modal manusia. (Idris, 2018)

6. Ranis-fei

Teori Gustav Ranis dan John Fei (Ranis-Fei) teori ini berkaitan dengan negara berkembang yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : yang pertama kelebihan buruh, yang kedua sumber daya alamnya belum dapat diolah, yang ketiga sebagian besar penduduknya bergerak di sektor pertanian, yang keempat banyaknya pengangguran dan yang terakhir tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Menurut Ranis-Fei ada tiga tahap pembangunan ekonomi dalam kelebihan tenaga kerja, yaitu :

- a) Tahap pertama yaitu, dimana para pengangguran semu (yang tidak menambah output pertanian) dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama.
- b) Tahap kedua yaitu, dimana pekerja pertanian menambah output tetapi memproduksi lebih kecil dari upah institusional yang mereka peroleh, dialihkan pula ke sektor industri.
- c) Tahap ketiga yaitu, ditandai awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan output lebih besar daripada perolehan upah institusional. Dan dalam hal ini kelebihan pekerja terserap ke sektor jasa dan industri yang meningkat terus-menerus sejalan dengan pertumbuhan output dan perluasan usahanya.(Oktapiani, 2021)

#### **2.1.3.4 Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi**

1. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan jangka panjang atas kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa dalam periode tertentu.
2. pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk skala nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk skala regional atau daerah tertentu dengan cara membandingkan PDB atau PDRB tahun sekarang dengan tahun masa lalu.
3. Perubahan terlihat dari segi kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk suatu negara atau daerah. Hal tersebut dapat dicapai berkat adanya perubahan atau kemajuan

teknologi dan manajemen dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Berikut cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi :

Rumus :

$$Y = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100 \%$$

Dimana :

Y : Laju pertumbuhan ekonomi

PDB<sub>t</sub> : Nilai PDB ADHK tahun sekarang

PDB<sub>t-1</sub> : Nilai PDB ADHK tahun sebelumnya

#### **2.1.4 Pengeluaran Pemerintah**

##### **2.1.4.1 Pengertian Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran Negara diartikan sebagai pengeluaran pemerintah dalam arti seluas-luasnya, tergantung pada macam dan sifat dari pengeluaran pemerintah tersebut. Pengeluaran Negara merupakan pengeluaran untuk membiayai tiap kegiatan pada suatu Negara dalam rangka menjalankan fungsinya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yang merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) setiap tahun ke berbagai sektor/bidang.

Pemerintah pusat terdapat APBN, maka di pemerintah provinsi terdapat APBD yang merupakan alokasi hasil dari dana alokasi APBN dari pemerintah pusat dan hasil dari pemungutan pajak dari masyarakat yang digunakan untuk pengeluaran belanja yang meliputi belanja operasi dan belanja modal. Belanja

operasi berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja operasi lainnya. Sedangkan belanja modal seperti belanja aset tetap, belanja aset lain-lain, dan belanja tak terduga.

#### **2.1.4.2 Teori Pengeluaran Pemerintah**

##### 1. Teori Adolf Wagner

Teori ini menekankan pada perkembangan persentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap GNP. Menurutnya apabila dalam suatu perekonomian pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah akan ikut meningkat. Dapat dilihat penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah yakni,

- a) Meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban,
- b) Meningkatnya fungsi kesejahteraan
- c) Meningkatnya fungsi perbankan
- d) Meningkatnya fungsi pembangunan. (Dr.H Ammirudin idris, S.E., 2018)

##### 2. Teori makro

Teori makro mengenai pembangunan pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

- a) Pada tahap awal, pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya.

- b) Pada tahap menengah, pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik.
- c) Pada tahap lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana keperluan pengeluaran untuk kegiatan sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat. Dan sebagainya.

### 3. Teori mikro

Untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan barang lain.

### 4. Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan

Menurut (Todoro, 2000) ada dua biaya pendidikan, yaitu; biaya-biaya pendidikan individual dan biaya-biaya pendidikan tidak langsung. Biaya pendidikan langsung individual ini yang kemudian berkenaan langsung pada pendapatan per kapita masyarakat. Biaya pendidikan langsung individual adalah segenap biaya moneter atau uang yang harus dipikul oleh siswa dan keluarganya untuk membiayai pendidikan.

#### 5. Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan

Besarnya pengeluaran pemerintah untuk sub-sektor kesehatan menunjukkan seberapa jauh prioritas alokasi dan pemerintah untuk sub-sektor kesehatan. Pada umumnya yang dilihat adalah besarnya rasio antara pengeluaran untuk sektor kesehatan terhadap total pengeluaran bangunan dan terhadap PDB

#### 6. Teori Peacock dan Wiseman

Teori ini memandang bahwa pemerintah selalu berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari pemungutan suara.

### **2.1.4.3 Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran Negara dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya, antara lain:

1. Pengeluaran Negara yang bersifat *self-liquidating* (yang mampu memberikan keuntungan), yakni pengeluaran Negara yang berupa pemberian jasa kepada masyarakat, sehingga nantinya akan mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat dari barang atau jasa yang diberikan BUMN kepada masyarakat. Ini berarti dengan adanya BUMN, maka Negara mendapatkan hasil juga.
2. Pengeluaran Negara yang bersifat reproduktif, yaitu pengeluaran Negara yang berakibat masyarakat dapat melakukan usaha dan

meningkatkan penghasilannya. Di lain pihak pemerintah akan menerima pendapatan juga misalnya dari retribusi dan pajak dari masyarakat.

3. Pengeluaran uang Negara tidak produktif, misalnya pengeluaran untuk membuat *monument* yang tidak menghasilkan pemasukan kembali. Pengeluaran untuk membiayai peperangan atau menumpas pemberontakan, dan lain-lain.
4. Pengeluaran untuk penghematan masa mendatang, misalnya untuk penyantunan anak yatim, kalau dimulai sejak dini biayanya lebih ringan dari pada kalau terlambat.
5. Salah satu wujud dari pengeluaran Negara adalah pemberian subsidi. Pemberian subsidi diberikan ke dalam dua hal, yaitu: subsidi yang berupa uang dan subsidi yang berupa barang dengan harga yang lebih rendah, di mana konsumen dapat membeli barang-barang tertentu dengan harga yang lebih rendah dari pada biasanya. Misalnya pegawai negeri mendapat jatah beras dengan harga lebih rendah dengan pemotongan gaji.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

No	Judul/nama	Variable bebas	Variable terikat	Metode/hasil	Sumber
1	Abdul kadir mahulauw Dwi budi santosa Putu mahardika  Pengaruh pengeluaran kesehatan dan pendidikan serta infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesehatan</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Infrastruktur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan IPM</li> <li>• Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan IPM</li> <li>• Infrastruktur mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan IPM</li> <li>• Pendidikan kesehatan, infrastruktur tidak berpengaruh langsung terhadap pendapatan perkapita.</li> <li>• Pendapatan per kapita sebagai variabel intervening tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM.</li> </ul>	Program magister ilmu ekonomi pascasarjana – Fakultas ekonomi dan bisnis universitas brawijaya
2	Denni sulistio mirza.  Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap indeks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemiskinan,</li> <li>• Pertumbuhan ekonomi,</li> <li>• Belanja modal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM</li> <li>• Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.</li> </ul>	Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

No	Judul/nama	Variable bebas	Variable terikat	Metode/hasil	Sumber
	pembangunan manusia di jawa tengah tahun 2006-2009			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM</li> </ul>	ISSN 2252-6560 2012 Universitas Negeri Semarang
3	Jihan aqilah rosyadah  Determinan indeks pembangunan manusia (IPM) provinsi nusa tenggara timur (NTT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laju pertumbuhan ekonomi,</li> <li>• Kepadatan penduduk,</li> <li>• Angka partisipasi murni,</li> <li>• Angka partisipasi kasar.</li> <li>• Upah minimum pekerja</li> </ul>	• IPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laju pertumbuhan ekonomi dan angka partisipasi kasar tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM</li> <li>• penduduk, angka partisipasi murni dan upah minimum memiliki pengaruh positif signifikan terhadap IPM</li> </ul>	Jurusan ekonomi pembangunan, fakultas ekonomi, universitas negeri semarang  © 2021 semarang state university. All rights reserved Received: july 2020 ; accepted: october 2020 ; published: january 2021
4	Nur baeti  Pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah terhadap Indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di provinsi jawa tengah tahun 2007-2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaruh pengangguran,</li> <li>• Pertumbuhan ekonomi,</li> <li>• Pengeluaran pemerintah</li> </ul>	• IPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan</li> <li>• Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan</li> <li>• Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan</li> </ul>	Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia  ISSN 2252-6889 EDAJ 2 (3) (2013)
5	Etik umiyati, amril, zulfanetti  Pengaruh belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin terhadap indeks pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja modal,</li> <li>• Pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Jumlah penduduk miskin</li> </ul>	• IPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.</li> <li>• Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM</li> <li>• Pertumbuhan ekonomi tidak</li> </ul>	Dosen fakultas ekonomi dan bisnis universitas jambi  email:umiyati.etik@yahoo.com

No	Judul/nama	Variable bebas	Variable terikat	Metode/hasil	Sumber
	manusia di kabupaten/kota provinsi jambi			berpengaruh signifikan terhadap ipm	
6	Ridwan Maulana, Prasetyo Ari Bowo  Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan teknologi terhadap IPM provinsi di indonesia 2007-2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Teknologi</li> </ul>	• IPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ekonomi dan pendidikan berpengaruh dan signifikan terhadap IPM</li> <li>• Teknologi tidak berpengaruh dan signifikan terhadap IPM</li> </ul>	Universitas negeri semarang, indonesia  Received : 2013; accepted: 2013; published: september 2013
7	Novita Dewi  Pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi Terhadap indeks pembangunan manusia Di provinsi riau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemiskinan</li> <li>• Pertumbuhan ekonomi</li> </ul>	• IPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM</li> <li>• Pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM</li> </ul>	<i>Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia</i>  JOM Fekon, Vol.4 No.1 (Februari) 2017 ekonomi universitas sebelas maret
8	Nursiah chalid dan yusbar yusuf  Pengaruh tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi riau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat kemiskinan</li> <li>• Tingkat pengangguran</li> <li>• Upah minimum</li> <li>• Laju pertumbuhan ekonomi</li> </ul>	• IPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat kemiskinan berpengaruh negative terhadap IPM</li> <li>• tingkat pengangguran berpengaruh negative terhadap IPM</li> <li>• Upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM</li> <li>• Variable yang sangat besar pengaruhnya terhadap IPM adalah laju pertumbuhan ekonomi.</li> </ul>	Jurusan ilmu ekonomi universitas riau  Volume 22, nomor 2 juni 2014

No	Judul/nama	Variable bebas	Variable terikat	Metode/hasil	Sumber
9	Septiana m. M. Sanggelorang, vekie a. Rumat, dan hanly f.dj. Siwu  Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• konsumsi perkapita</li> <li>• pemerataan pendapatan</li> <li>• upah minimum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan</li> <li>• Pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan berpengaruh negative dan signifikan</li> </ul>	<p>Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unsrat Manado</p> <p>Jurnal berkala ilmiah efisiensi vol. 15 no. 02 - edisi juli 2015</p>
10	Andriana Okta Fara Diba, Moehammad Fathorrazi, Rafael Purtomo Somaji.  Pengaruh Kemiskinan, PDRB, dan PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kemiskinan</li> <li>• DPRB</li> <li>• PAD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemiskinan berpengaruh negative dan signifikan terhadap IPM</li> <li>• PDRB berpengaruh dan signifikan terhadap IPM</li> <li>• PAD berpengaruh dan signifikan terhadap IPM</li> </ul>	<p>Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jember (UNEJ), Indonesia</p> <p>ISSN Cetak: 2548-8945 ISSN Online: 2722-211X</p> <p>Volume 2 No. 1 (2018)</p>
11	Muliza, T. Zulham, Chenny Seftarita  Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan Dan Pdrb Terhadap Ipm Di Provinsi Aceh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengeluaran Pemerintah Pendidikan</li> <li>• Pengeluaran Pemerintah Kesehatan</li> <li>• Kemiskinan</li> <li>• PDRB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengeluaran Pemerintah Pendidikan berpengaruh dan signifikan terhadap IPM</li> <li>• Pengeluaran Pemerintah Kemiskinan berpengaruh dan signifikan terhadap IPM</li> <li>• PDRB berpengaruh dan signifikan terhadap IPM</li> </ul>	<p>Jurusan Ilmu Ekonomi, Feb Unsyiah, Banda Aceh</p> <p>Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam</p> <p>Volume 3 Nomor 1, Maret 2017 Issn. 2502-6976</p>

No	Judul/nama	Variable bebas	Variable terikat	Metode/hasil	Sumber
12	Angga Setiawan Fikriah, Syiah Kuala  Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Perlindungan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengeluaran Pemerintah Pendidikan</li> <li>• Pengeluaran Pemerintah kesehatan</li> <li>• Perlindungan sosial</li> </ul>	• IPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengeluaran Pemerintah Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM</li> <li>• Pengeluaran Pemerintah kesehatan berpengaruh negative dan signifikan terhadap IPM</li> <li>• Perlindungan social berpengaruh negative dan signifikan terhadap IPM</li> </ul>	Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala  Vol.5 No.4 November 2020 : 212 – 221 ISSN.2549-8363

## 2.3 Kerangka Pemikiran

### 2.3.1 Hubungan Tingkat Kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia

Sesuai dengan teori kemiskinan absolut dimana sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, penduduk hidup dibawah pendapatan *rill* minimum atau dapat dikatakan hidup dibawah kemiskinan Internasional.

Jika garis kemiskinan semakin meningkat dan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka maka akan terciptanya lingkaran setan dimana akan terlihat dari rendahnya pendapatan nyata sehingga akan mengakibatkan permintaan menjadi rendah sehingga investasi juga rendah dan dapat mengurangi produktivitas.

Selain itu, lingkaran setan juga menyangkut keterbelakangan manusia dan sumber daya alam, dimana perkembangan sumber daya alam itu tergantung pada kemampuan produktivitas manusianya. Jika tingkat

kemiskinannya tinggi maka manusia tidak akan mampu untuk memperoleh pendidikan sehingga terciptalah penduduk yang terbelakang dan buta huruf sehingga kemampuan untuk mengolah sumber daya alam yang produktif tidak terpenuhi bahkan terbengkalai atau salah guna (Todaro dan Smith, 2006).

Hal demikian dikarenakan pada umumnya penduduk miskin lebih banyak menghabiskan tenaga dan waktu yang ada untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Mereka tidak tertarik untuk melibatkan diri pada aktivitas-aktivitas yang tidak secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Hasil penelitian-penelitian tersebut memperjelas bahwa semakin tinggi populasi penduduk miskin akan menekan tingkat pembangunan manusia, sebab penduduk miskin memiliki daya beli yang rendah. (Mirza, 2012)

Hubungan Kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu (Novita dewi, 2017) Kemiskinan berpengaruh *negative* dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau. Setiap peningkatan Kemiskinan akan menurunkan persentase IPM di Provinsi Riau.

### **2.3.2 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia**

Teori yang dikemukakan oleh Professor Kuznet dimana salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi modern adalah tingginya pertumbuhan *output* perkapita (Todaro, 1997). Pertumbuhan *output* yang dimaksudkan

adalah PDRB per kapita, tingginya pertumbuhan *output* menjadikan perubahan pola konsumsi dalam pemenuhan kebutuhan. Artinya semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi pertumbuhan *output* per kapita dan merubah pola konsumsi dalam hal ini tingkat daya beli masyarakat juga akan semakin tinggi. Tingginya daya beli masyarakat akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia karena daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator komposit dalam IPM yang disebut indikator pendapatan. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu (Denni Sulistio Mirza, 2012) pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. Apabila pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

### **2.3.3 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Kesehatan dengan Indeks Pembangunan Manusia**

Hal ini berbanding lurus dengan teori Indeks Pembangunan Manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui tiga dimensi dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup artinya semakin tinggi belanja pemerintah pada sektor

kesehatan semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat dengan sendirinya akan meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia. (Dima & Seran, 2020)

Belanja bidang kesehatan adalah belanja yang dipergunakan untuk bidang kesehatan. Kesehatan merupakan hal yang sangat berpengaruh bagi IPM, karena kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat, maka daripada itu setiap warga berhak memperoleh kesehatan yang baik. Karena kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan apabila masyarakat sehat maka masyarakat akan sejahtera. Oleh karena itu penyelenggara pelayanan publik perlu memperhatikan bidang kesehatan (Todaro, 2000).

Hubungan Pengeluaran Pemerintah Kesehatan dengan Indeks Pembangunan Manusia hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu (Angga Setiawan, 2020) Belanja pada bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Apabila pengeluaran pemerintah kesehatan mengalami peningkatan, maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

#### **2.3.4 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Pendidikan dengan Indeks Pembangunan Manusia**

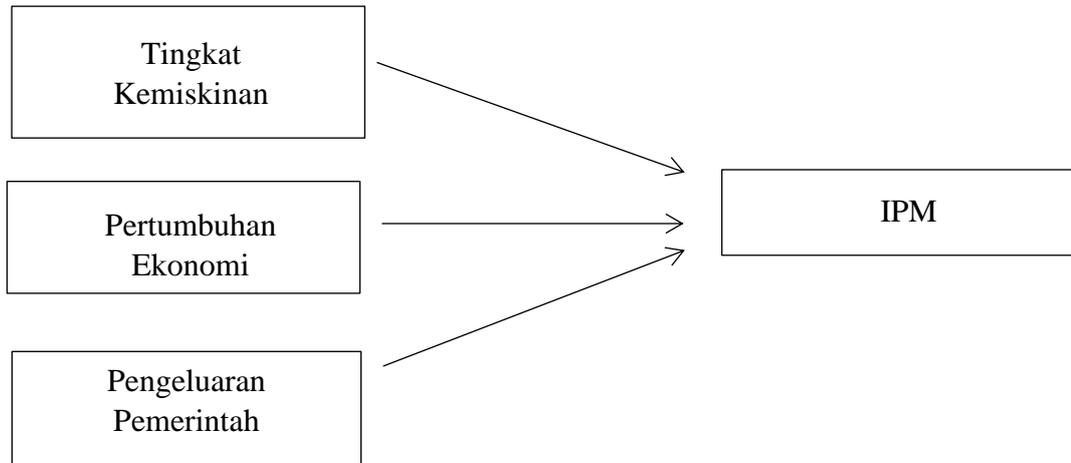
Untuk mengukur dimensi pendidikan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup dan untuk mengukur dimensi ekonomi digunakan indikator kemampuan daya beli artinya semakin tinggi belanja pemerintah pada sektor pendidikan semakin tinggi pula

kesejahteraan masyarakat dengan sendirinya akan meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia.

Belanja pada bidang pendidikan merupakan belanja yang dipakai guna membiayai penyelenggaraan pendidikan yang merupakan tanggung jawab dari pada Pemerintah, termasuk biaya membayar tenaga pendidik, akan tetapi tidak masuk di dalamnya anggaran untuk sekolah kedinasan. Belanja pada bidang ini adalah pengeluaran pemerintah sangat penting dan mendasar bagi pembangunan manusia. Seorang yang berpendidikan tentunya memiliki peluang besar untuk memperoleh pekerjaan lebih baik sehingga bisa memperbaiki standar hidupnya untuk menjadi lebih baik. Untuk meningkatkan produktivitas masyarakat maka pengalokasian anggaran pemerintah pada bidang pendidikan adalah bentuk konkret dari investasi sumber daya manusia (Todaro, 2000).

Hubungan Pengeluaran Pemerintah Pendidikan dengan Indeks Pembangunan Manusia hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu (Angga Setiawan, 2020) Belanja pada bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Apabila pengeluaran pemerintah pendidikan mengalami peningkatan, maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang telah dipaparkan, maka kerangka berfikir mengenai variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

#### **2.4 Hipotesis**

Hipotesis merupakan kesimpulan teoritis yang masih harus dibuktikan kebenarannya melalui analisis terhadap bukti-bukti empiris. Berdasarkan acuan pada dasar pemikiran teoritis dan studi empiris yang pernah dilakukan dengan penelitian di bidang ini dan dengan asumsi *ceteris paribus*, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia provinsi di Pulau Jawa 2011-2021.
2. Diduga secara bersama-sama Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia provinsi di Pulau Jawa 2011-2021.